



Implementasi Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Pada Dinas Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Riau

Saptarahmawati¹ Nurman² Dia Meirina Suri³

¹²³Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Riau, Indonesia,
febyhidayat@gmail.com aldri@fis.unp.ac.id nurman@soc.uir.ac.id lincemagriasti@fis.unp.ac.id

Received : September 17, 2024; Accepted : Oct 30, 2024
DOI 10.25299/jiap.2024.19127

Abstract

The aim of this research is to determine and analyze the implementation of strategies for increasing food security at the Food Crops and Horticulture Department of Riau Province. The theory used in this research is the theory of Murniawati and Usman (2015:50) which was implemented in the Riau Farming Program. The research type is descriptive qualitative. The number of research informants was 13 people with the Head of the Riau Province Food Crops and Horticulture Service as the key informant while the extension workers and farmers were the informants. Data collection techniques using interviews and qualitative analysis techniques using typology were carried out based on the author's interpretation of the data, both written material, interviews and observations. The results of the research show that the implementation of the Food Security Improvement Strategy at the Riau Province Food Crops and Horticulture Department is not optimal. This is due to limited agricultural land, limited extension services both in terms of quantity and quality, how to use agricultural tools and on the other hand, such as increasing productivity, increasing IP 200, mechanization of agricultural tools and farmer institutions that are not yet understood by farmers. For this reason, it is recommended that the Head of the Department make the intensification and extensification program more effective by increasing technical guidance to extension workers and farmers, providing seeds both in terms of quality and quantity, fostering farmer cooperative institutions and increasing outreach to farmers as well as increasing the budget for food security from the Riau Bertani program.

Key words: Implementation, Strategy, and Food Security.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Implementasi Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Murniawati dan Usman (2015:50) yang diimplementasikan pada Program Riau Bertani. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan penelitian adalah 13 orang dengan Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebagai key informan sedangkan penyuluh dan petani sebagai informan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara serta Teknik analisa kualitatif dengan tipologi ini dilakukan berdasarkan interpretasi penulis atas data, baik bahan tertulis, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau **belum optimal**. Hal ini dikarenakan keterbatasan lahan pertanian, keterbatasan penyuluh baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, cara penggunaan alat – alat pertanian dan disisi lain seperti peningkatan produktivitas, peningkatan IP 200, mekanisasi alat – alat pertanian dan kelembagaan petani belum dipahami oleh petani. Untuk itu disarankan kepada kepala Dinas dapat mengefektifkan program intensifikasi dan ekstensifikasi melalui peningkatan bimtek kepada penyuluh dan petani, pemberian bibit baik dari segi kualitas maupun kuantitas, pembinaan kelembagaan koperasi petani dan peningkatan sosialisasi kepada petani serta penambahan anggaran untuk ketahanan pangan dari program Riau Bertani.

Kata Kunci : Implementasi, Strategi, dan Ketahanan Pangan.

Pendahuluan

Pertumbuhan penduduk Indonesia dewasa ini semakin melonjak tinggi, hal ini dapat memicu terjadinya kerawanan pangan di Indonesia. Dalam pasal 12 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 ditegaskan bahwa ketersediaan pangan dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah adalah merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diantaranya adalah; Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Ketahanan dan seluruh *stakeholder* yang ada di masing-masing daerah di Indonesia.

Ketahanan pangan itu sendiri merupakan sebuah masalah pembangunan berkelanjutan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan pangan dan pertanian, melainkan juga berkaitan erat dengan kesehatan, pembangunan ekonomi, lingkungan dan perdagangan. Sejalan dengan kondisi global, negara-negara berkembang termasuk Indonesia akan menghadapi keadaan yang semakin sulit untuk mencapai, mempertahankan dan meningkatkan kualitas berkelanjutan ketahanan pangan (FAO dalam Suryana, 2014).

Dalam mencapai ketahanan pangan dan penghindaran dari situasi rawan pangan, Indonesia memiliki hambatan yaitu adanya konversi lahan pertanian menjadi daerah industri. Hal ini mempersempit lahan pertanian dan mengurangi optimalisasi tingkat produksi petani. Jika dibiarkan berlanjut, kondisi ini akan memicu terjadinya instabilitas nasional.

Tabel I.1

Perkembangan Luas Lahan Baku Sawah Provinsi Riau Tahun 2021 – 2023

No	Kabupaten / Kota	Luas Baku Sawah (Ha)		
		2021	2022	2023
1	Kuantan Singingi	6.228	6.219	6.212
2	Indragiri Hulu	2.772	2.62	2.76
3	Indragiri Hilir	18.999	18.934	18.911
4	Pelalawan	7.151	7.103	7.076
5	Siak	3.92	3.919	3.909
6	Kampar	3.24	3.236	3.228
7	Rokan Hulu	1.685	1.681	1.683
8	Bengkalis	3.002	3.001	2.975
9	Rokan Hilir	11.901	11.9	11.847
10	Kep. Meranti	3.445	3.44	3.437
11	Pekanbaru	2	1	3
12	Dumai	332	332	333
	Riau Jumlah	62.569	62.528	62.374

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan, 2023



Provinsi Riau adalah salah satu daerah yang tidak direkomendasikan oleh Pemerintah Pusat untuk memproduksi pangan, sehingga perlu memiliki beragam pendekatan untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Pada Tahun 2020, Riau menduduki posisi ke-29 dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 64,12 dari berbagai provinsi di Indonesia.

Pembangunan ketahanan pangan dan pertanian menjadi salah satu bidang perhatian dan akan diperkuat dalam kurun waktu 2020-2024, sebagai mana tercantum dalam misi ke-3 Gubernur Riau yaitu **“Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing”**. Strategi program pangan yang dilakukan pemerintah yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau diantaranya adalah;

1. Program peningkatan ketahanan pangan, dengan meningkatkan ketersediaan pangan bagi seluruh penduduk dan setiap rumah tangga.
2. Program peningkatan produksi produktivitas dan mutu hasil pertanian, dengan meningkatkan keterjangkauan

pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat.

- a. Peningkatan pemanfaatan pangan dengan memfokuskan pada percepatan panganakeragaman komunikasi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal dan ditunjang pengawasan mutu dan keamanan pangan segar, pembangunan pertanian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
 - b. Peningkatan luas panen dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan, peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana dengan menerapkan teknologi pertanian yang berwawasan lingkungan.
3. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian dengan peningkatan kompetensi SDM aparatur dan petani, serta peningkatan kualitas pelayanan OPD.
 4. Program yang sudah dimulai dari tahun 2020 adalah Program Bertani, yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk menanam padi dengan harapan mampu meningkatkan produksi beras di Riau.

Kebijakan dan program-program tersebut diimplementasikan dengan memperhatikan sub-sistem ketahanan pangan yang mencakup; 1) Sub-sistem ketersediaan pangan, 2) Sub-sistem keterjangkauan pangan, 3) Sub-sistem konsumsi pangan dan gizi. Hal ini diarahkan untuk mengusahakan pencapaian ketahanan pangan bagi negara hingga tingkat perseorangan dengan asas kemandirian dan kedaulatan pangan.

Provinsi Riau memiliki target produksi beras (50%) untuk mencukupi kebutuhan beras dari penduduk Provinsi Riau sekitar 7.410.230 jiwa dengan luas baku sawah Riau seluas 62.689 adalah

519.914 Ton beras, maka didatangkanlah beras dari Provinsi Sumatera Barat dan Medan, bahkan sampai mengimpor beras dari Luar Negeri seperti Thailand dan Vietnam. Data produksi padi di Provinsi Riau, dengan luas tanam dan produktivitas dapat dilihat pada tabel berikut;



Sumber : Bidang Tanaman Pangan 2023.

Dari tabel diatas, diketahui jumlah produksi padi di Provinsi Riau bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/ kota wajib untuk memberikan perhatian khusus untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang tahan pangan sampai ke tingkat rumah tangga dan perseorangan. Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Riau berdasarkan Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah adalah Provinsi Riau belum mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan pokok pangan.

Tinjauan Pustaka

Kansep Administrasi

Administrasi sebagai cabang dari ilmu – ilmu sosial secara implisit merupakan bagian dari teori sosial. Artinya untuk melakukan pengkajian atas berbagai gejala administrasi haruslah berdasar pada teori ilmu – ilmu sosial sebagai dasar (utama), sedangkan teori administrasi akan menjadi teori kajian. (Ali dalam Nurman, 2023:21)

Selanjutnya, Nurman, 2023:21 menambahkan bahwa administrasi merupakan suatu sistem dari suatu kegiatan formal yang dilakukan secara teratur, sistematis dan saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara sub sistem atau bagian yang satu dengan sub sistem atau bagian yang lainnya. Administrasi diibaratkan seperti tubuh seorang manusia yang utuh, memiliki kepala, mata, telinga, hidung, tangan, kaki, perut, wajah, mulut, lidah dan jenis kelamin antara satu bagian dengan bagian yang lain saling berkaitan dan saling menentukan.

Dari Definisi di atas penulis dapat menyimpulkan, bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan kerjasama dua orang atau lebih untuk pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa bekerja sendiri serta membutuhkan orang lain yang didukung oleh berbagai fasilitas sarana dan prasarana untuk mencapai suatu tujuan.

Konsep kebijakan

Kebijakan adalah konsep sebagai dasar yang dapat dijadikan pedoman/standar dalam melakukan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan dapat mengatur kehidupan organisasi publik, organisasi privat maupun organisasi kemasyarakatan. Beberapa model-model implementasi kebijakan, antara lain:

A. Model C. Edwards III (dalam Hardiansya, 2017:23)

- a. Apa prasyarat untuk keberhasilan implementasi kebijakan;
- b. Apa hambatan utama keberhasilan implementasi kebijakan. Jawabnya antara lain:

1. Komunikasi: Dasar bergeraknya organisasi tergantung kepada Sosialisasi

- (1) Kualitas Media (cetak dan elektronik),
- (2) Ketepatan pesan yang disampaikan, dan
- (3) akses informasi. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diketahui oleh kelompok sasaran (target grup) guna menghindari kesimpangsiuran informasi. Hassel Nogi S, (1960:45) menjelaskan komunikasi mempunyai unsur (a) ketepatan komunikasi dengan pelaksana, (b) keseragaman ukuran dasar dan tujuan yang dikomunikasikan, (c) ukuran dan tujuan harus dinyatakan dengan jelas sehingga pelaksana dapat melaksanakannya, (d) mekanisme dan prosedur lembaga yang terlibat, (e) komunikasi yang akurat diterima oleh komunikator, dan (f) ukuran implementasi adalah konsistensinya. Dimensi komunikasi adalah: komunikator, komunikan, pesan, media yang digunakan dan **efek** (perubahan/konsekuensi) langsung yang disebabkan oleh suatu tindakan.

A. Sumber Daya: Efektivitas Kebijakan bukan hanya ditentukan oleh komunikasi yang jelas dan konsisten tetapi juga perlu didukung oleh sumber daya yang kuat seperti SDM (kompetensi implementator), sumber daya finansial, dan berbagai fasilitas seperti bangunan, peralatan, mesin, merek, paten, dll).

Dimensi Sumber Daya adalah: jumlah staf, keahlian para pelaksana, informasi yang cukup dan relevan, dan fasilitas pendukung seperti dana dan Saprasi.

B. Disposisi: watak atau karakter yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran dan demokratis. Langkah pertama yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah pengangkatan dan penempatan personil secara profesional guna menghindari kesalahan implementasi antara keputusan pelaksanaan dan capaian kebijaksanaan, dan yang lebih operasional dapat dilihat urutan yang termuat/tertulis di dalam lembaran disposisi/lembaran

khusus. Dimensi Disposisi adalah: kesadaran pelaksana, kesadaran dalam merespon program (diterima/ditolak), dukungan pejabat pelaksana seperti menempati kebijakan menjadi prioritas, menempatkan pelaksana orang-orang yang mendukung program, memperhatikan kondisi daerah secara proporsional, agama, suku, jenis kelamin, dan karakter demografi serta dana yang cukup untuk insentif bagi pelaksana program.

C. Struktur Birokrasi: Wadah, wujudnya adalah Struktur Organisasi yang mengimplimentasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implimentasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang paling penting dari setiap organisasi adalah adanya Prosedur Operasi yang Standar (SOP) sebagai pedoman bagi setiap implimentator. Hal ini diperlukan untuk menghindari tekanan-tekanan di luar unit pelaksana. Selain itu adalah Budaya Kerja seperti keterbukaan komunikasi dan jelas, penghargaan dan motivasi, dan Kerjasama (dapat berupa konsultan), pemahaman substansi makna kerja, sikap terhadap pekerjaan, lingkungan pekerjaan, etos kerja, sikap terhadap waktu, peralatan kerja, kebebasan pegawai untuk bereksperimen meningkatkan kepercayaan diri dan tanggungjawab mereka, pemberian pembinaan.

D. Dimensi Struktur birokrasi adalah: Standar Operasional

Prosedur (SPO) seperti SOP waktu, tindakan yang dilakukan, mutasi/perpindahan pegawai, standar yang dibuat oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau kepala SKPD, alternatif jika terjadi sesuatu di luar dugaan, dan karakteristik kelompok sasaran.

2. Model Mazmanian dan Sabatier

Implimentasi kebijakan adalah fungsi dari 3 variabel, yaitu:

A. Mudah/tidaknya masalah dikendalikan, dengan indicator:

- (a) Kesukaran-kesukaran teknis;
- (b) Keberagaman perilaku kelompok sasaran;
- (c) Prosentase kelompok sasaran sebanding jumlah penduduk;
- (d) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.

B. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implimentasi, dengan indicator:

- (a) Kejelasan dan konsistensi tujuan;
- (b) Digunakannya teori kausal (sebab dan akibat) yang memadai;
- (c) Ketepatan alokasi sumber dana;

C. Keterpaduan hierarki dalam dan diantara Lembaga pelaksana, aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana dan akses formal pihak luar

Sedangkan Variabel di luar (variable dependen) kebijakan yang mempengaruhi proses implimentasi kebijakan, dengan indikato a. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi; b. Dukungan public; c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki oleh kelompok-kelompok; d. Dukungan dari pejabat atasa e. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

Muzmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2002:51) menyimpulkan bahwa implimentasi adalah pelaksanaan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lainnya. Yang perlu diperhatikan adalah ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih

tindakan sendiri yang otonom di dalam batas kewenangannya apabila menghadapi situasi khusus. Ini perlu panduan yang jelas untuk menyesuaikan diri apabila ada kasus-kasus yang bersifat khusus ketika melakukan implementasi kebijakan. Tentu saja panduan ini tidak menjadi “pasal-pasal karet” yang dapat menurunkan keefektifan dari implementasi kebijakan itu sendiri.

3. Model Van Meter dan Van Horn

Kinerja implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standar dan sasaran tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan, indikatornya:

- (a) Standar dan sasaran kebijakan secara tertulis;
- (b) Sumberdaya;
- (c) Karakteristik organisasi pelaksana;
- (d) Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan (rekrutmen dan seleksi, penugasan dan relokasi, kenaikan pangkat dan Tindakan pemecatan);
- (e) Sikap para pelaksana;
- (f) Lingkungan social, ekonomi dan politik

4. Model Merilee S. Grindle

Lebih dikenal dengan pendekatan Top Down. (1) Aksi kebijakan, yaitu pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*), (2) tujuannya tercapai. Yang menjadi indikatornya adalah efek pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi, dan penerimaan kelompok sasaran.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi tidak ada variable tunggal yang cocok atau sesuai dengan kegiatan implementasi kebijakan, keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor seperti kebijakan yang diimplementasikan, pelaksana kebijakan,

dan lingkungan (target group) dimana kebijakan tersebut diimplementasikan.

Strategi kebijakan

Strategi merupakan sekumpulan cara secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, sebuah perencanaan dalam kurun waktu tertentu. Pelaksanaan strategi menurut Wheelen dan Hunger dalam Safi'i dan Satlita (2016:3) adalah proses mewujudkan strategi yang telah diformulasikan ke dalam aksi melalui tiga indikator, yaitu program, anggaran serta prosedur. Strategi menurut Stoner dkk dalam Tania (2018:8) mendefinisikan konsep strategi berdasarkan 2 perspektif yang berbeda yaitu (a) Perspektif apa yang organisasi ingin lakukan, artinya program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan implementasi misinya dan (b) Perspektif apa yang akhirnya organisasi lakukan artinya pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Konsep Manajemen Strategi

Manajemen strategis dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan teknik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategis organisasi. Menurut Yunus (2016:4) manajemen strategis merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya, Riva'i dalam Yunus (2016:14) proses manajemen strategi secara umum dapat dicapai melalui tiga langkah yang terdiri dari:

- 1) Penerapan Strategi (*Formulating Strategy*). Formulasi strategi meliputi mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman dari luar organisasi, menetapkan tujuan-tujuan (sasaran-sasaran) jangka panjang, menghasilkan strategi-strategi tertentu untuk dijalankan.
- 2) Implementasi Strategi (*Implementing Strategy*). Implementasi strategi menghendaki supaya menetapkan sasaran-sasaran pertahunnya, menetapkan kebijakan-kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya agar strategi yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan. Pengimplementasian strategi mencakup membangun suatu budaya yang mendukung strategi, menciptakan sebuah struktur organisasi yang efektif dan mengarahkan kembali usaha-usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan menggunakan sistem informasi dan menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi.
- 3) Evaluasi Strategi (*Evaluating Strategy*). Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategi. Evaluasi strategi adalah alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan.

Kemudian, Murniati dan Usman (2015:50) dimensi implementasi strategi terdiri dari:

- 1) Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan.
- 2) Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang, setiap program yang akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan

mengendalikan. Manfaat anggaran dalam sebuah strategi antara lain adalah bahwa perusahaan memiliki rencana terpadu yang dapat digunakan sebagai pedoman pendanaan pelaksanaan kegiatan strategi, alat koordinasi, alat pengawasan kerja dan alat evaluasi strategi.

- 3) Prosedur/ Standar Operational Procedur (SOP). Prosedur atau sering disebut SOP adalah sistem langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau pekerjaan diselesaikan.

Konsep Pangan

Pangan adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan manusia (Fitriyani, et al., 2019). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, Pangan adalah segala sesuatu mulai dari mata air alami pertanian, peternakan, hutan, perikanan, peternakan, air dan barang, jika ditangani, yang ditetapkan sebagai makanan atau minuman untuk pemanfaatan manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan mentah pangan, dan lain-lain. bahan yang digunakan dalam perencanaan, persiapan, dan produksi makanan atau minuman. Kebutuhan pangan terus meningkat berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah. Jika hal tersebut diabaikan, maka akan timbul masalah kerawanan pangan yang akan menyebabkan kelaparan serta penurunan berat badan akibat masalah daya beli ataupun masalah ketersediaan pangan.

Konsep Ketahanan Pangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, Ketahanan Pangan adalah keadaan terpenuhinya gizi bagi negara kepada masyarakat yang tercermin dari

keterjangkauan pangan yang memadai, baik jumlah maupun mutunya, terlindungi, beragam, bergizi, adil dan wajar serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya daerah setempat, memiliki pilihan untuk hidup terdengar, dinamis, dan bermanfaat dengan cara yang dapat diatur.

Kemudian, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2020) ada tiga aspek yang memengaruhi tingkat ketahanan pangan, yakni:

- 1) Ketersediaan pangan merupakan kondisi di mana tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan jika kedua sumber utama belum bisa memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung mulai tingkat nasional, regional, kabupaten/kota hingga tingkat masyarakat.
- 2) Akses pangan merupakan kemampuan rumah tangga dalam memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui salah satu atau kombinasi dari beragam sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, barter, pembelian, pinjaman, hadiah, dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan pada suatu daerah ada, akan tetapi tidak bisa diakses oleh rumah tangga tertentu apabila mereka tidak mampu secara fisik seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, mengakses keragaman dan jumlah makanan yang cukup.
- 3) Pemanfaatan pangan merupakan penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu dalam memetabolisme dan menyerap zat gizi. Pemanfaatan pangan sendiri meliputi cara pengolahan, penyimpanan, dan penyiapan makanan, keamanan air untuk

memasak dan minum, kebiasaan pemberian makan, kondisi kebersihan, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan, dan status kesehatan seluruh anggota rumah tangga. Peran dari seorang ibu yang besar dalam meningkatkan kesehatan gizi keluarga, terutama untuk bayi maupun anak-anak, pendidikan ibu juga sering menjadi variabel untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Sedangkan, Hartati (2017) ketahanan pangan memiliki 4 unsur yaitu :

- a) Ketersediaan pangan setiap waktu untuk rumah tangga dan tingkat individu (*food availability/supply*);
- b) Pangan tersebut bisa diakses baik secara ekonomi, fisik, dan sosial, setiap waktu (*access to supplies*);
- c) Orientasi ketahanan pangan bertujuan dalam pemenuhan gizi (*food utilization*);
- d) Tujuan ketahanan pangan adalah untuk mewujudkan hidup yang produktif dan sehat (*food sustainability*).

Sementara, Delly, et. al (2019) terdapat beberapa faktor yang memengaruhi ketahanan pangan rumah tangga, yakni tingkat pendidikan ibu rumah tangga, pendapatan rumah tangga, pengeluaran rumah tangga, dan jumlah anggota rumah tangga. Maxwell dan Smith dalam Gevisioner (2010:15) mengatakan bahwa ketahanan pangan menunjukkan adanya akses setiap individu untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan setiap waktu. Hal ini berarti ketahanan pangan memiliki empat dimensi, yaitu:

- a) Kecukupan pangan, yang ditunjukkan oleh tingkat kecukupan energi untuk aktif dan hidup sehat,
- b) Akses pangan, yang berarti adanya kemampuan untuk memproduksi,

membeli pangan maupun menerima pemberian pangan,

- c) Jaminan, yaitu adanya jaminan untuk memperoleh cukup pangan dan
- d) Waktu, yaitu adanya jaminan untuk memperoleh cukup pangan secara berkelanjutan.

Pengembangan ketahanan pangan mempunyai perspektif pembangunan yang sangat mendasar, karena:

- a) Akses terhadap pangan dengan gizi seimbang bagi segenap rakyat Indonesia merupakan hak yang paling azasi bagi manusia.
- b) Keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pemenuhan kecukupan konsumsi pangan dan gizi.
- c) Ketahanan pangan merupakan basis atau pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Implementasi kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub-sistem ketahanan pangan, yang mencakup:

- 1) Sub-sistem ketersediaan pangan;
- 2) Sub-sistem keterjangkauan pangan; serta
- 3) Subsistem konsumsi pangan dan gizi.

Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mengusahakan pencapaian ketahanan pangan bagi negara

hingga tingkat perseorangan dengan berlandaskan pada kemandirian dan kedaulatan pangan.

Konsep Operasional Penelitian

Untuk keseragaman pengertian dalam penelitian ini, maka dijelaskan dan dirumuskan beberapa konsep sebagai berikut;

- a) Administrasi adalah proses kerjasama antara lembaga terkait dalam menentukan strategi peningkatan ketahanan pangan pada dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.
- b) Organisasi adalah lembaga yang memiliki tugas, kewenangan dan tanggungjawan dalam menentukan strategi peningkatan ketahanan pangan pada dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.
- c) Manajemen adalah strategi dalam merumuskan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian penggunaan sumber daya dalam peningkatan produktivitas, peningkatan IP 200, penerapan mekanisasi dan penguatan kelembagaan ketahanan pangan pada dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.
- d) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah strategi dalam meningkatkan kompetensi Sumberdaya Manusia melalui pelatihan pengolahan lahan dan air (irigasi, jaringan tersier, badan air, jalan usaha tani/tanggul/embung/*long storage*) , penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB), pemupukan dalam peningkatan ketahanan pangan pada dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau.
- e) Implementasi pelaksanaan program Riau Betani pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura provinsi Riau dalam peningkatan ketahanan pangan.

f) Ketahanan pangan adalah kondisi di mana, terpenuhinya pangan bagi masyarakat hingga pada tingkat individu.

g) Penerapan mekanisasi melalui perencanaan penerapan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) secara efektif dan efisien. Mulai dari penyiapan lahan hingga panen, penentuan biaya dasar pengoperasian alat dan mesin, kapasitas kerja dan efisiensi mesin, analisis kelayakan dan ekonomi, dan pemilihan mesin melalui UPJA dan Brigade Alsintan. UPJA adalah sebuah lembaga ekonomi di pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan Alsintan untuk memperoleh keuntungan usaha. melalui Brigade Alsintan ini dapat memberikan contoh sekaligus mengawal pemanfaatan Alsintan oleh Gapoktan, Poktan, UPJA secara optimal untuk mendorong kegiatan percepatan olah tanah.

h) Penguatan kelembagaan melalui koporasi tani yakni mengubah pola kerja petani menjadi lebih modern melalui BUMD, Koperasi dan Perusahaan Terbatas.

Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Data dari informan terkait dikumpulkan secara jelas untuk menilai kondisi lingkungan kerja pertanian. Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau sebagai informan kunci. Sedangkan Kapada Bidang (Kabid) Ketahanan Pangan dan Kabid Tanaman Pangan, Penyuluh Pertanian dan Petani dari daerah dengan produksi tinggi.

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dan informasi yang dikumpul diseleksi. Teknik analisa kualitatif dengan menggunakan *tipologi klassen*. Untuk menghindari atau meminimalisasi

kemungkinan adanya bias, maka penulis berusaha mencocokkan hasil wawancara antara satu narasumber dengan yang lainnya, dan dengan dokumen-dokumen yang terkait.

Hasil dan Pembahasan

Ketahanan pangan telah menjadi isu sentral dalam kerangka pembangunan pertanian dan pembangunan nasional yang mana merupakan prioritas utama dalam pembangunan, dikarenakan pangan adalah kebutuhan yang paling dasar bagi manusia sehingga sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional (kakisina, 2020). Tingkat ketahanan pangan dapat dipengaruhi oleh tingkat harga pangan pokok yang berlaku di suatu daerah sehingga mempengaruhi kemampuan rumah tangga untuk mengakses dan menjangkau pemenuhan pangan bagi rumahtangganya. Ketersediaan pangan didukung oleh penyediaan pangan yang memperhatikan tingkat kuantitas serta kualitas pangan yang diperlukan secara berkelanjutan.

Strategi keterjangkauan pangan terkait aksesibilitas seseorang terhadap pangan meliputi; 1) aspek fisik, seperti sarana dan prasarana transportasi, sistem logistik, dan sistem distribusinya serta kebijakan perdaganag dan pemasaran pangan, 2) aspek ekonomi, seperti daya beli masyarakat yang dilihat dari indikator pendapatan dan jumlah anggota rumah tangga yang menjadi tanggungan.

Strategi keterjangkauan pangan terdiri dari; efisiensi perdagangan dan pemasaran pangan, pengelolaan cadangan pangan pokok oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok, merivitalisasi tata kelola lumbung pangan untuk cadangan pangan masyarakat, menyalurkan bantuan pangan bersubsidi bagi masyarakat miskin dan kekurangan

pangan (Suryana A, 2016).Berbagai upaya Dinas tanaman Pangan dan hortikultura provindsi riau dijabarkan melalui program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terintegrasi baik di provinsi maupun di kabupaten dengan meningkatkan kerjasama yang sinergi dan terarah antar institusi dan komponen masyarakat serta koordinasi program dan kegiatan berbagai subsektor dan sektor.

1. Program Riau Bertani

Program memiliki dua pengertian yaitu secara umum dan khusus. Pengertian secara umum, program diartikan sebagai “rencana”. Dalam menentukan program ada tiga pengertian penting yang perlu ditekankan yaitu: (1) implementasi atau realisasi suatu kebijakan, (2) bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan dan terjadi pada waktu yang relatif lama, dan (3) terjadi dalam organisasi yang mengikutsertakan sekumpulan orang.

a. Peningkatan Produktivitas

Produktivitas merupakan faktor sangat penting dalam mempertahankan dan mengembangkan keberhasilan suatu organisasi/perusahaan. Dengan menggunakan sumber daya vital (SDM, Bahan Baku, Uang) secara efektif maka akan memberikan hasil yang lebih baik. Produktivitas merupakan salah satu alat ukur bagi perusahaan dalam menilai prestasi karyawan. Produktifitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara input (modal, tanah, energy) yang dipakai untuk menghasilkan ouput (hasil) tersebut (Basu Swasta, 2002:281). Upaya pemerintah terkait dalam peningkatan produktifitas;

- 1) Program Riau bertani Program Riau bertani dengan target peningkatan produktifitas padi minimal 50% dengan cara memanfaatkan lahan

tidur milik pribadi dengan penyuluhan dari penyuluh pertanian untuk kelompok tani, dan melakukan berbagai upaya pendampingan dan sosialisasi terhadap para petani

- 2) Penggunaan benih varietas unggul bersertifikat yang dibarengi dengan penerapan teknologi budidaya tanaman yang sesuai dengan sistem pengelolaan produksi benih yang baik unggul bersertifikat dengan melakukan pembinaan petani
- 3) Pemberian inovasi-inovasi baru terkait teknologi pertanian dan juga membimbing, merangkum setiap usulan dan aspirasi masyaraakt dan para kelompok tani untuk peningkatan produksi, produktifitas dan kualitas produk pertanian yang berdaya saing.
- 4) Menginstruksikan gerakan percepatan peningkatan pangan melalui kebijakan strategis daerah dengan melakukan peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi, selain itu juga menggiatkan kerja sama antar daerah melalui jejaring distribusi dan pasokan bahan pangan dengan Provinsi tetangga.

b. Peningkatan IP 200

Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri, seperti porang dan sagu yang bisa dibuat menjadi beras pengganti padi, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha.

Pengembangan sektor tanaman pangan merupakan salah satu strategi kunci dalam memacu pertumbuhan

ekonomi pada masa yang akan datang. Komoditi tanaman pangan memiliki peranan pokok sebagai pemenuh kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri yang setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan, juga sebagai sumber penghasilan devisa yang besar.

Berkurangnya lahan subur untuk usaha pertanian serta meningkatnya kebutuhan pangan nasional terutama beras akibat pertambahan jumlah penduduk menyebabkan pilihan pemenuhan kebutuhan pangan diarahkan pada pemanfaatan lahan lebak, baik untuk kepentingan pertanian maupun untuk pemukiman penduduk.

Penggunaan lahan lebak untuk pertanian dan dilakukan secara efisien akan memberikan sumbangan bagi kelangsungan pertumbuhan ekonomi negara. Lahan lebak merupakan lahan marginal dan merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan lahan lebak sebagai areal produksi pertanian khususnya tanaman pangan merupakan alternatif yang tepat, mengingat arealnya yang sangat luas pemanfaatannya dan belum dilakukan secara intensif.

Upaya pemerintah terkait dalam hal peningkatan IP 200;

- 1) Penggunaan benih unggul penakaran benih dan pengembangan Varietas Unggul Baru (VUB) dan melakukan penerapan mekanisasi melalui alat mesin pertanian dengan memberdayakan usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) dan juga Brigade Alsintan.
- 2) Penguatan kelembagaan melalui klaster korporasi atau food estate yaitu Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan regenerasi Petani Muda

- 3) Melakukan fungsional daerah irigasi atau daerah rawa, jaringan irigasi atau pintu air, JUT, Tanggul, embung, long storage juga Penggunaan lahan rawa lebak dengan pola tanam baru.

c. Penerapan Mekanisasi

Penggunaan alat dan mesin pertanian sudah sejak lama digunakan dan perkembangannya mengikuti dengan perkembangan kebudayaan manusia. Pada awalnya alat dan mesin pertanian masih sederhana dan terbuat dari batu atau kayu kemudian berkembang menjadi bahan logam. Susunan alat ini mula – mula sederhana, kemudian sampai ditemukannya alat mesin pertanian yang kompleks. Dengan dikembangkannya pemanfaatan sumber daya alam dengan motor secara langsung mempengaruhi perkembangan dari alat mesin pertanian.

Sesuai dengan definisi dari mekanisasi pertanian (*agriculture mechanization*), maka penggunaan alat mekanisasi pertanian adalah untuk meningkatkan daya kerja manusia dalam proses produksi pertanian dan dalam setiap tahapan dari proses produksi tersebut selalu memerlukan alat mesin pertanian. Upaya pemerintah terkait dengan penerapan mekanisasi adalah dengan melakukan penerapan mekanisasi melalui alat mesin pertanian dengan memberdayakan UPJA dan juga brigade Alsintan dan penguatan kelembagaan melalui klaster koperasi petani atau food estate yaitu BUMP berbentuk koperasi atau PT dengan melakukan pelatihan pertanian dan regenerasi petani (Petani Muda).

d. Penguatan Kelembagaan

Kelembagaan adalah aturan main, baik bersifat struktural maupun kultural. Kelembagaan lebih luas dari sekadar organisasi. Sebagai aturan dan hak yang tegas memberikan naungan, sanksi, dan konstrain terhadap individu-individu dan

kelompok dalam menentukan pilihan. Kelembagaan dapat diprediksi, stabil, dan dapat diaplikasikan pada situasi berulang (Arifin dalam Khudori, 2012). Upaya pemerintah terkait penguatan kelembagaan berupa; harmonisasi kebijakan dan perencanaan program antar kelembagaan Pangan, optimalisasi Sumber daya, penguatan implementasi program, evaluasi dan monitoring untuk perbaikan selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator program belum berperan secara maksimal, didapatkan temuan di lapangan;

- 1) Program terlalu banyak tapi realisasi di daerah kurang fokus pada kegiatan, sedangkan pembiayaan lebih banyak di dominasi di dinas, namun di lapangan tidak/belum fokus pada kegiatan, dengan kata lain teori banyak, sedangkan praktek minim.
- 2) Hasil produksi padi petani di masing-masing kelompok tani berbeda-beda, karena masih ada beberapa petani yang masih memiliki keterampilan bertani yang rendah.
- 3) Produksi padi meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat di beberapa wilayah penghasil beras tertinggi seperti, Rokan Hilir dan Siak. Pencapaian produksi beras mencapai ribuan ton per tahun dengan melibatkan koordinasi dari banyak pihak.
- 4) Peningkatan ekstensifikasi sulit dilakukan karena adanya keterbatasan lahan, sedangkan peningkatan intensifikasi dilakukan dengan pengolahan lahan dengan sistem yang baik, penggunaan sarana produksi (penggunaan bibit unggul dan bersertifikat, penggunaan pupuk yang

berimbang, pengendalian hama dan penyakit yang tidak merusak lingkungan) dengan tepat guna dan teknologi.

Dari temuan di lapangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa indikator program belum berjalan maksimal, karena adanya berbagai kendala di lapangan. Target peningkatan produktifitas padi yang dicanangkan Gubernur Riau sebesar 50% sampai tahun 2024 masih belum tercapai. Peningkatan IP menjadi 200 belum terpenuhi, karena hasil produksi padi di beberapa daerah di Provinsi Riau masih naik turun.

Dalam upaya penerapan mekanisasi, telah dilakukan upaya peningkatan produksi padi dengan pemberdayaan UPJA dan juga brigade Alsintan, namun masih belum maksimal karena minimnya pengetahuan dan keterampilan petani terhadap mekanisasi alat pertanian yang baru. Penguatan kelembagaan seperti Kluster koperasi petani, telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari keaktifan salah satu lembaga yaitu koperasi RTBS (Koperasi Riau Tani Berkah Sejahtera) yang bekerja sama dengan dinas koperasi dan UMKM.

Salah satu faktor yang mempengaruhi produksi padi adalah luas panen dan luas tanam, sedangkan sebagian besar lahan sawah di Riau sangat tergantung terhadap iklim, sehingga sering terjadi penurunan produksi padi. Hal ini akan mengganggu ketersediaan beras dan mengakibatkan lonjakan harga bahan pangan lainnya. Selain itu, adanya pengalih fungsian lahan pertanian menjadi perkebunan. Sedangkan faktor penghambat yaitu masih rendahnya produktivitas tanaman pangan di Prov. Riau masih dibawah produktivitas nasional juga rendahnya intensitas pemanfaatan lahan pertanian yang

disebabkan karena dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai.

2. Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ketahanan Pangan

Perubahan kekuasaan pemerintahan akan berimplikasi pada lahirnya dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan dan pencapaian berbagai output strategis di atas, anggaran ketahanan pangan dalam APBN Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp94.984,1 miliar (kemenkeu.go.id, 2022). Sebagian besar anggaran ketahanan pangan tahun 2023 dialokasikan melalui BPP, terutama belanja K/L yang terdiri atas belanja pada Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas pokok di sektor pangan, serta Kementerian PUPR terkait infrastruktur pertanian (irigasi dan waduk/bendungan).

Sementara itu, alokasi melalui belanja pemerintah pusat non- K/L meliputi penyaluran subsidi pupuk (pupuk cair dan noncair), subsidi bunga kredit resi gudang, antisipasi atas stok beras pemerintah dan stabilisasi harga

pangan. Alokasi anggaran ketahanan pangan Indonesia 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,9% menjadi Rp95 triliun dari tahun 2022 di angka Rp94,1 triliun (kemenkeu.go.id, 2022). Berdasarkan data diatas, besaran dana APBN terus meningkat dalam 3 tahun terakhir, namun secara realisasinya masih belum mencukupi dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Riau.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ketahanan Pangan

APBD yaitu suatu rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD adalah instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi pemerintah daerah selain sebagai salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau diketahui bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berupaya meningkatkan ketahanan pangan melalui dua program unggulan yakni gerakan "Riau Bergerak Tanam Padi" dan gerakan "Riau Bergerak Tanam Buah". Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa besaran dana APBD dalam tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Namun hal itu masih belum mencukupi dalam meningkatkan ketahanan pangan di provinsi riau.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator anggaran belum berperan optimal, hal ini dikarenakan anggaran yg diperkirakan terukur secara rasional mencapai setiap sumber pendapatan, namun pada kenyataannya, implementasi anggaran tersebut tidak cukup digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan di prov. Riau. Realisasi anggaran yg tidak optimal tersebut menyebabkan tidak

tercapainya target pada tahun 2023, hal ini menunjukkan bahwa dana anggaran tersebut belum terserap dengan maksimal. Meskipun selama ini realisasi anggaran lebih sedikit dari anggaran, tidak menjamin bahwa pengeluaran tersebut sudah efektif dan efisien.

Faktor pendukung dalam indikator anggaran yaitu arah kebijakan ketahanan pangan tersebut diimplementasikan pada beberapa program pemerintah yang didanai melalui APBN melalui penyediaan bantuan sarpras produksi pertanian dan perikanan, bantuan benih dan bibit unggul, bantuan pupuk, pengembangan smart farming dan digitalisasi pertanian (*e-agriculture*), pengembangan kawasan secara terintegrasi, penguatan food estate dan korporasi petani, pengairan/irigasi, pendampingan dan penyuluhan, serta upaya penanggulangan penyakit dan hama.

Sedangkan faktor penghambat dalam program ini salah satunya adalah faktor anggaran yang belum tercukupi atau bahkan kurang jika hanya mengandalkan APBD saja. Selain itu, kegiatan pertanian sempat terganggu dengan adanya masalah pandemic dari segi mobilitas. Faktor lainnya yaitu budaya dan mindset masyarakat dimana terkadang masyarakat hanya menanam padi untuk mencukupi kebutuhannya sendiri sehingga untuk kegiatan peningkatan indeks pertanaman sekiranya lahan bisa ditanami dua kali dalam setahun, tetapi petani lebih memilih menanam satu kali setahun, hal-hal seperti ini harus dikomunikasikan kepada masyarakat sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai apa yang telah ditargetkan.

3. Prosedur

Prosedur adalah tahapan atau langkah-langkah yang saling berkaitan yang dilakukan oleh seseorang maupun

organisasi dalam suatu kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Rifka (2017) Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam suatu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam. Sedangkan menurut Rasto (2015) suatu prosedur adalah seperangkat tindakan yang ditetapkan atau kejadian yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai hasil tertentu.

a. Sosialisasi Roadmap

Peran penyediaan prasarana, sarana, dan pembiayaan pertanian menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Karena itu, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) perlu mereposisi tugas dan fungsi yang selama ini sebagai pendukung menjadi penggerak utama (*prime mover*) dan pengarah (*trend setter*) pembangunan pertanian maju, mandiri, dan modern.

Upaya pemerintah terkait Sosialisasi Road Map;

- 1) menggelar Rakor kegiatan Riau Bergerak Tanam Padi (Bertani) 2020-2024 untuk meningkatkan produksi padi di Riau untuk menyamakan persepsi antar Pemprov Riau dan Daerah terhadap Roadmap Tanam Padi di Riau tahun 2020-2024
- 2) menyiapkan gerakan "Riau Bertani" (Bergerak Tanam Padi-red), dengan Kostra Tani sebagai motor penggerakannya. Adapun fokus kegiatan utama adalah penggunaan benih unggul melalui penyediaan benih.
- 3) pengembangan penangkaran benih dan varietas unggul baru. Termasuk peningkatan Indeks Pertanaman melalui

Fungsional Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa, jaringan Irigasi Tersier, Embung, Tanggul dan Long Storage.

Berdasarkan hasil penelitian pada sub indikator sosialisasi Road Map diketahui belum optimal dikarenakan sosialisasi belum dilaksanakan secara merata, belum banyak yang mengetahui adanya road map yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Riau terutama daerah yang berada jauh dari ibu kota Provinsi.

b. Kerjasama Riau Bertani Pemprov Riau dengan Berbagai Instansi

Dalam meningkatkan produksi padi di Provinsi Riau melalui Program Riau Bertani. Upaya pemerintah terkait kerjasama Riau dengan Berbagai instansi;

- 1) Penandatanganan nota kesepakatan tentang upaya khusus daerah *Geeakan Daerah Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian dalam Penyediaan Pangan di Provinsi Riau.*
- 2) Rapat Koordinasi tahunan dan juga sosialisasi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan target produktivitas padi di Provinsi Riau dengan melakukan perjanjian MoU untuk melaksanakan program di Provinsi Riau.
- 3) *Rapat Koordinasi tindaklanjut kerjasama dengan berbagai pihak yaitu Komandan Korem 031/Wira Bima, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bappedalitbang, Kadis PTPH Prov Riau, Kepala BSIP Riau, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Dandim se-Provinsi Riau, Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota se Provinsi Riau.*

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui kerjasama Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan instansi lain dalam rangka peningkatan produktivitas pangan di Provinsi Riau. Adapun tujuan kerjasama tersebut adalah mengetahui jumlah persediaan beras di Provinsi Riau. Demi menutupi kekurangan beras di Riau, maka Riau melakukan kerjasama dengan Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Jawa Barat. Namun kerjasama tersebut masih berupa perjanjian saja, belum ada realisasi yang signifikan dikarenakan kebutuhan beras di Provinsi Riau sendiri masih tercukupi. Namun apabila sudah tidak ada lagi beras sedangkan kondisi penduduk yang sudah *panic buying* maka kerjasama tersebut akan direalisasikan.

c. Penyusunan satu data peta berbasis WebGis

Kondisi terpenuhinya pangan, pangan yang tersedia, baik dari segi kecukupan, pemerataan, mutu, kemanan, diversifikasi dan cukup terpenuhi, ini merupakan cerminan ketahanan pangan pada suatu negara. Perlunya penelitian mengenai dimensi ketahanan pangan berbasis Web GIS pada saat pandemi ini sangat penting, karena dapat mendukung kestabilan pangan dan ekonomi bagi masyarakat, dan pengguna dapat lebih mudah mengaksesnya pada Web GIS ini.

Menurut Food and Agriculture Organization, kriteria dimensi ketahanan pangan yaitu: akses pangan, ketersediaan pangan, penggunaan pangan dan stabilitas pangan. Prinsip-prinsip tentang pengukuran ketahanan pangan dan saran tentang jenis intervensi yang berpotensi memperkuat kemampuan para pemangku kepentingan di bidang pangan dan pembuat kebijakan untuk merespons sistem ketahanan pangan di masa depan

berbasis sinergitas. mengenai dimensi ketahanan pangan berbasis Web GIS pada saat pandemi ini sangat penting, karena dapat mendukung kestabilan pangan dan ekonomi bagi masyarakat, dan pengguna dapat lebih mudah mengaksesnya pada Web GIS ini.

Menurut Food and Agriculture Organization, kriteria dimensi ketahanan pangan yaitu: akses pangan, ketersediaan pangan, penggunaan pangan dan stabilitas pangan. Prinsip-prinsip tentang pengukuran ketahanan pangan dan saran tentang jenis intervensi yang berpotensi memperkuat kemampuan para pemangku kepentingan di bidang pangan dan pembuat kebijakan untuk merespons sistem ketahanan pangan di masa depan berbasis sinergitas.

Upaya pemerintah terkait Penyhusunan satu data peta berbasis WEBGIS berupa Program Peningkatan Diversifikasi, dan ketahanan pangan masyarakat, program penanganan kerawanan pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Program Riau Bertani. Program-program ini ditetapkan sebagai strategi dalam menjaga ketahanan pangan, selain strategi tersebut Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki strategi alternatif seperti bekerjasama dengan pihak swasta untuk membantu pengadaan alat mesin produksi pertanian.

Proses perumusan strategi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu melibatkan Bappeda sebagai stakeholder lain. Petani merupakan sasaran dari segala kegiatan yang dilaksanakan karena memiliki pengaruh dalam suksesnya sebuah program, perumusan strategi yang hanya

melibatkan Bappeda dipikir kurang maksimal tanpa adanya keterlibatan petani dalam proses perumusan strategi. Selain itu, ide dan pendapat petani dalam penetapan strategi alternatif tentang apa saja kebutuhan dan kendala petani dilapangan dapat menjadi sebuah inovasi dalam pengembangan sektor pertanian, apabila saat proses perumusan strategi melibatkan petani.

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Strategi Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dikatakan belum maksimal disetiap kegiatan yang dilakukannya, karena secara umum banyak kegiatan yang belum mencapai target yang diharapkan seperti Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dan Program Riau Bertani, program ini sama-sama mengalami kendala dalam merubah *mindset* dan budaya masyarakat setempat yang butuh waktu yang lama dalam melakukan hal tersebut. *Mindset* masyarakat Riau khususnya yang masih bertahan dengan paradigma lama yaitu belum makan nasi berarti belum makan, sehingga sudah melekat di benak masyarakat. Cara pandang masyarakat inilah yang menyebabkan ketergantungan terhadap nasi. Beras menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan budaya pangan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yaitu rendahnya intensitas pemanfaatan lahan pertanian yang disebabkan dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai. Terbatasnya infrastruktur pertanian yang berdampak terhadap peningkatan Indeks Pertanaman (IP), penambahan luas baku lahan, penambahan luas tambah tanam dan peningkatan produktifitas. Masih rendahnya produktivitas tanaman pangan di Provinsi Riau yakni masih dibawah produktivitas nasional.

Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman, harus diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan penerapan teknologi budidaya yang baik, Sumber daya manusia (SDM) Petani, serta pendampingan yang maksimal dari petugas lapang. Kapasitas profesionalisme SDM Aparatur dan petani belum memadai sehingga menyebabkan masih rendahnya penerapan teknologi budidaya tanaman oleh petani.

Aparatur Sipil Negara merupakan unsur utama sumber daya manusia yang mempunyai peranan yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat membentuk sosok aparatur pemerintah yang baik, dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat adalah suatu keharusan dari suatu organisasi birokrasi dan merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia sekaligus sebagai salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi. Alih fungsi lahan dari tanaman pangan ke non-tanaman pangan (perkebunan dan perikanan) dan bahkan ke non-pertanian (jalan, perumahan dan pertokoan, dll) setiap tahun semakin meningkat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau " **belum optimal**". Hal ini disebabkan oleh

keterbatasan lahan pertanian, keterbatasan penyuluh baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, cara penggunaan alat-alat pertanian. Untuk itu disarankan perlu adanya kolaborasi antara Dinas dan Instansi terkait, baik ditingkat pusat maupun daerah, mengintensivkan potensi lahan yang tersedia, mengevaluasi kembali pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan, mengangkat tenaga penyuluhan, tenaga pendampingan dan pembimbingan kepada setiap kelompok tani.

Daftar Pustaka

- Abdurrahmat Fathoni. 2009. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- AR, Murniati & Nasir Usman. 2015. Implementasi Manajemen Strategik dalam Pemberdayaan Sekolah Menengah Kejuruan. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Boediono, 1999, Teori Pertumbuhan Ekonomi, Yogyakarta: BPFE
- Creswell, J. W. 2010. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Edwards, Jack E, John C. Scott, and Nambury S. Raju. 2007. Evaluating Human Resources Programs: A 6-Phase Approach for Optimizing Performance. San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc.
- Fandy Tjiptono, 2004, Strategi Pemasaran, edisi kedua, Andi,. Yogyakarta.
- Gaspersz, Vincent. 1997. Manajemen Kualitas. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Hardiansyah .2011. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media
- Ibrahim. 2008. Prinsip-Prinsip Total Quality Service. Yogyakarta: Andi.

- Hasibuan, Malayu. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Lijan, Sinambela. 2014 . Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moenir. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi. Aksara.
- Nurman dan Andriyus, 2014. Demografi dan Ketenagakerjaan. Marpoyan Tujuh, Pekanbaru
- Nurman, 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Rajawali Pers, Jakarta
- Nurman, 2023. Teori Administrasi. Administrative Executive. Deepublish, Yogyakarta
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2014. Manajemen pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rivai, Veithzal dan Ella Sagala, 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prastiwi, S dan Meirinawati. 2015. Manajemen Strategi Dinas Kebudayaan dan. Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Dalam Mengembangkan Potensi Objek Wisata. CV Pustaka. Setia. Bandung.
- Sedarmayanti, 1999, Restruktur dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Esensial dan Aktual, Bandung: Mandar Maju
- Sedarmayanti, 2010. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, cetakan kedua, Penerbit : Mandar Maju. Bandung.
- Siagian, Sondang., P. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi. Pertama). Jakarta: Binapura Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana dkk, 2005. Ilmu Administrasi Publik, PT. Rineka Cipta,. Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.